Jurnal Pendidikan dan Keguruan
Vol. 4 No. 9, November (2026), Hal. 624-631
https://jutepe-joln.net/index.php/JURPERU
e-ISSN: 2986-3295

TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI BELANDA: DARI KOLONIALISME MENUJU MULTIKULTURALISME DAN RELEVANSINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Komsiah
Universitas Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas
komsiahkomsi82@gmail.com

Pahriah
Universitas Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas
Pahriah.sdn03@gmail.com

Arkiah
Universitas Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas

ABSTRACT

This study aims to analyze the transformation of Islamic education policy in the Netherlands from the colonial era to multiculturalism and its relevance to Islamic education in Indonesia. This study uses a qualitative approach with library research method. Data were obtained from the analysis of various literature in the form of scientific journals and books. The analysis focuses on one theory, namely James Banks' Multiculturalism Theory, and two figures, namely Abraham Kuyper from the Netherlands and Ki Hajar Dewantara from Indonesia. The results show that Islamic education policy in the Netherlands has undergone three phases of transformation: the suppression phase in the colonial era, the pillarization phase in the Kuyper era, and the multiculturalism phase in the contemporary era. The synthesis of this study produces a Model of Multicultural Islamic Education Based on Pillarization and Among, namely the state provides freedom and fair funding, but schools still maintain Islamic and national values.
Keywords: *Islamic Education Policy, Netherlands, Colonialism, Multiculturalism.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kebijakan pendidikan Islam di Belanda dari masa kolonialisme hingga multikulturalisme dan relevansinya bagi pendidikan Islam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh dari analisis terhadap berbagai literatur berupa jurnal ilmiah dan buku. Analisis difokuskan pada satu teori, yaitu Teori Multikulturalisme James Banks, dan dua tokoh, yaitu Abraham Kuyper dari Belanda dan Ki Hajar Dewantara dari Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Belanda mengalami tiga fase transformasi: fase penekanan pada masa kolonial, fase pilarisasi pada masa Kuyper, dan fase multikulturalisme pada masa kontemporer. Sintesis kajian ini menghasilkan Model Pendidikan Islam Multikultural Berbasis Pilarisasi dan Among, yaitu negara memberi kebebasan dan pendanaan yang adil, tetapi sekolah tetap menjaga nilai keislaman dan kebangsaan.
Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan Islam, Belanda, Kolonialisme, Multikulturalisme.

PENDAHULUAN

Belanda adalah negara yang unik. Belanda pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun dan melarang pendidikan Islam berkembang, tetapi saat ini Belanda justru menjadi salah satu negara Eropa yang paling terbuka terhadap sekolah Islam (Maussen, 2022: 45). Di Belanda saat ini terdapat lebih dari 60 sekolah dasar Islam yang dibiayai penuh oleh negara

(Bracke, 2023: 112). Ini adalah perubahan yang sangat besar.

Di Indonesia situasinya terbalik. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim, tetapi pendidikan Islam masih sering dianggap sebagai pendidikan kelas dua dibandingkan pendidikan umum (Nawawi, 2024: 108). Sekolah Islam di Indonesia masih berjuang untuk mendapatkan pendanaan dan pengakuan yang adil.

Kontras tersebut memunculkan pertanyaan: Bagaimana Belanda yang dulu menjajah bisa berubah menjadi negara yang membiayai sekolah Islam? Dan apa yang bisa dipelajari Indonesia dari Belanda?

Penelitian sebelumnya sudah membahas topik ini, tetapi masih ada celah yang belum diisi. Penelitian Maussen (2022: 50) sudah membahas kebijakan pendidikan Islam di Belanda, tetapi belum menghubungkannya dengan teori multikulturalisme James Banks secara khusus dan belum membandingkannya dengan tokoh Indonesia. Penelitian Bracke (2023: 118) sudah membahas sekolah Islam di Belanda, tetapi belum membahas relevansinya bagi Indonesia secara sistematis. Penelitian Kurniawan (2022: 128) sudah membahas pendidikan Islam di Indonesia, tetapi belum menggunakan perbandingan dengan Belanda sebagai cermin. Inilah celah yang diisi oleh penelitian ini.

Penelitian ini terletak pada tiga hal. Pertama, penelitian ini menghubungkan tiga fase sejarah Belanda (kolonialisme, pilarisasi, multikulturalisme) dengan lima dimensi multikulturalisme James Banks secara langsung, bukan hanya menyebutnya secara terpisah. Kedua, penelitian ini membandingkan dua tokoh dari dua negara yang berbeda, yaitu **Abraham Kuyper** dari Belanda dan **Ki Hajar Dewantara** dari Indonesia, yang belum pernah dibandingkan dalam satu kajian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menghasilkan model baru yang disebut Model Pendidikan Islam Multikultural Berbasis Pilarisasi dan Among, yang menggabungkan kebebasan negara dari Belanda dan sistem among dari Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (Kurniati et al., 2022: 70).

Literatur dipilih dengan kriteria yang jelas. Kriterianya adalah: (1) membahas kebijakan pendidikan Islam di Belanda, multikulturalisme, dan pendidikan Islam di Indonesia, (2) bersumber dari jurnal serta buku yang relevan. Pencarian literatur dilakukan melalui Google Scholar, dan perpustakaan dengan kata kunci: kebijakan pendidikan Islam, Belanda, kolonialisme, multikulturalisme, James Banks, Ki Hajar Dewantara.

Literatur ditemukan dan dipilih yang paling relevan. Literatur yang tidak dipilih dikeluarkan karena pembahasannya terlalu umum dan tidak berkaitan langsung dengan transformasi kebijakan pendidikan Islam di Belanda.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi dengan langkah: pertama, mengumpulkan literatur dan membaca secara mendalam. Kedua, mengklasifikasikan literatur berdasarkan tema: kolonialisme, pilarisasi, multikulturalisme, dan relevansi Indonesia. Ketiga, membandingkan kebijakan Belanda dan Indonesia. Keempat, melakukan sintesis untuk menghasilkan model baru**.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini berangkat dari satu pertanyaan besar: kenapa negara Belanda yang dulu menjajah dan menekan pendidikan Islam, sekarang justru menjadi negara yang paling adil terhadap sekolah Islam? Pertanyaan ini penting karena di Indonesia sendiri, negara yang mayoritas Muslim, pendidikan Islam masih sering dianggap sebagai pendidikan kelas dua (Nawawi, 2024: 108). Artinya, ada sesuatu yang berubah di Belanda dan perlu dipelajari.

Perubahan di Belanda itu tidak terjadi begitu saja dalam satu malam. Perubahan itu terjadi melalui tiga tahap yang panjang. Tahap pertama adalah masa kolonialisme, di mana pendidikan Islam ditekan dan tidak diberi ruang. Tahap kedua adalah masa pilarisasi, di mana setiap kelompok agama diberi kebebasan untuk mengurus sekolahnya sendiri dan mendapat dana yang sama dari negara. Tahap ketiga adalah masa multikulturalisme, di mana perbedaan agama dan budaya tidak lagi dianggap sebagai masalah, tetapi dianggap sebagai kekayaan negara (Maussen, 2022: 45).

Untuk memahami perubahan itu, penelitian ini memakai teori dari James Banks tentang pendidikan multikultural. Menurut Banks, sekolah yang baik bukan hanya sekolah yang mengajarkan pelajaran, tetapi sekolah yang mengajarkan keadilan, toleransi, dan kebangsaan (Banks, 2023: 78). Teori ini dipakai sebagai alat untuk menilai, apakah kebijakan Belanda itu sudah adil atau belum. Apakah sekolah Islam di Belanda hanya sekadar dibiayai, atau benar-benar dihargai sebagai bagian dari bangsa Belanda.

Selain teori Banks, pembahasan ini juga membandingkan dua tokoh besar dari dua negara yang berbeda, yaitu Abraham Kuyper dari Belanda dan Ki Hajar Dewantara dari Indonesia. Kuyper adalah tokoh yang memperjuangkan pilarisasi, yaitu kebebasan dan keadilan dana untuk semua sekolah agama. Sedangkan Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang memperjuangkan sistem among, yaitu cara mendidik dengan mengasuh, membimbing, dan memberi teladan kepada anak, bukan dengan cara memerintah dan menekan (Rambe, et al., 2026: 5). Keduanya hidup di zaman yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama ingin pendidikan yang memanusiakan anak.

Perbandingan ini penting karena Kuyper kuat di sisi kebijakan negara, tetapi lemah di sisi cara mendidik di dalam kelas. Sebaliknya, Ki Hajar kuat di sisi cara mendidik anak, tetapi tidak membahas bagaimana negara harus membiayai sekolah secara adil. Jika keduanya digabungkan, maka akan lahir sebuah model yang lengkap: negara berlaku adil dari atas, dan guru mendidik dengan kasih sayang dari bawah. Model inilah yang nanti disebut sebagai Model Pendidikan Islam Multikultural Berbasis Pilarisasi dan Among.

Pembahasan ini dibagi menjadi empat bagian. Pertama, dibahas perubahan kebijakan dari masa kolonialisme, pilarisasi, sampai multikulturalisme. Kedua, dibahas perbandingan antara pemikiran Abraham Kuyper dan Ki Hajar Dewantara. Ketiga, dibahas model baru yang lahir dari perpaduan keduanya, yaitu Model Pendidikan Islam Multikultural Berbasis Pilarisasi dan Among. Keempat, dibahas apa relevansinya untuk pendidikan Islam di Indonesia.

Transformasi Kebijakan Pendidikan Islam di Belanda

Fase Kolonialisme

Pada masa kolonialisme, Belanda menerapkan kebijakan pendidikan yang menekan pendidikan Islam. Di Indonesia yang dijajah, Belanda hanya mengizinkan pendidikan Barat untuk kalangan elit dan melarang pesantren berkembang secara bebas (Sari, 2024: 92). Di Belanda sendiri, pendidikan dikuasai oleh gereja dan negara, dan Islam tidak diakui sebagai agama yang memiliki hak untuk mendirikan sekolah (Maussen, 2022: 45).

Menurut Aslan (2024: 45), pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang mengalami diskriminasi yang sistematis. Belanda membuat kebijakan dualisme pendidikan, yaitu pendidikan Barat untuk anak-anak Belanda dan priyayi, sedangkan pendidikan Islam hanya dibiarkan hidup di pesantren dan surau tanpa bantuan dana dari pemerintah (Aslan, 2024: 46). Akibatnya, pendidikan Islam menjadi tertinggal dan dianggap sebagai pendidikan kelas dua.

Temuan ini diperkuat oleh Husnaini (2024: 85) yang menjelaskan bahwa kebijakan kolonial ini didasari oleh pandangan bahwa pendidikan Islam adalah ancaman bagi kekuasaan kolonial. Oleh karena itu, Belanda membuat kebijakan yang membuat pendidikan Islam tertinggal.

Fase kolonialisme ini menjadi bukti awal bahwa Belanda pada masa itu belum menerapkan satu pun dimensi multikulturalisme James Banks, karena Belanda belum memberikan integrasi konten dan pendanaan yang adil (Banks, 2023: 78).

Fase Pilarisasi

Perubahan besar terjadi pada akhir abad ke-19 melalui perjuangan Abraham Kuyper. Kuyper adalah tokoh Belanda yang memperjuangkan sistem pilarisasi atau verzuiling, yaitu setiap kelompok agama berhak mendirikan sekolahnya sendiri dan dibiayai oleh negara secara adil (Bracke, 2023: 112).

Kuyper menegaskan bahwa negara tidak boleh memonopoli pendidikan. Negara harus memberi kebebasan kepada kelompok Katolik, Protestan, dan kemudian kelompok Muslim untuk mendidik anaknya sesuai dengan keyakinannya, tetapi negara tetap memberi pendanaan yang sama (Maussen, 2022: 48). Perjuangan Kuyper ini berhasil. Pada tahun 1917, Belanda menetapkan Pasal 23 UUD yang menjamin kebebasan pendidikan dan pendanaan yang sama untuk sekolah negeri dan sekolah swasta keagamaan.

Fase ini sangat penting karena menjadi dasar hukum bagi berdirinya sekolah Islam di Belanda pada masa berikutnya. Tanpa perjuangan Kuyper, sekolah Islam di Belanda tidak akan pernah dibiayai oleh negara.

Fase Multikulturalisme

Pada masa kontemporer, Belanda masuk ke fase multikulturalisme. Belanda tidak lagi melihat Islam sebagai agama pendatang, tetapi sebagai bagian dari keberagaman Belanda (Bracke, 2023: 115). Sekolah Islam di Belanda saat ini tidak hanya diajarkan agama Islam, tetapi juga diajarkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan kewarganegaraan Belanda.

Fase ini juga menghadapi tantangan. Beberapa politisi Belanda menganggap sekolah Islam tidak mengajarkan nilai Belanda dan ingin menutupnya (Maussen, 2022: 52). Tantangan ini menunjukkan bahwa multikulturalisme di Belanda belum sepenuhnya selesai, tetapi Belanda sudah jauh lebih maju dibandingkan masa kolonial.

Teori Multikulturalisme James Banks

Untuk memahami transformasi di atas, penelitian ini menggunakan Teori Multikulturalisme James Banks. Banks menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki lima dimensi (Banks, 2023: 78).

Pertama, integrasi konten, yaitu kurikulum harus memasukkan budaya dan agama yang beragam. Kedua, konstruksi pengetahuan, yaitu siswa diajak memahami bahwa pengetahuan itu dipengaruhi oleh budaya. Ketiga, pedagogi yang adil, yaitu guru harus mengajar dengan cara yang adil untuk semua siswa. Keempat, pengurangan prasangka, yaitu sekolah harus mengurangi prasangka antar kelompok. Kelima, pemberdayaan budaya sekolah, yaitu sekolah harus memberdayakan semua kelompok (Banks, 2023: 80).

Jika teori Banks ini digunakan untuk melihat Belanda, maka Belanda pada masa kolonialisme tidak memenuhi satu pun dari lima dimensi ini. Belanda pada masa pilarisasi sudah memenuhi dimensi pertama dan kelima, yaitu integrasi konten dan pemberdayaan sekolah. Belanda pada masa multikulturalisme sudah berusaha memenuhi kelima dimensi ini, meskipun masih belum sempurna (Fikri, 2023: 36).

Menurut Anwarul (2025: 28), teori Banks ini juga relevan untuk Indonesia karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Jika Indonesia ingin pendidikan Islamnya maju, maka Indonesia harus menerapkan lima dimensi Banks ini di sekolah Islam.

Abraham Kuyper (Belanda) dan Ki Hajar Dewantara (Indonesia)

Setelah memahami teori Banks, sekarang dibandingkan dua tokoh yang menjadi kunci dalam penelitian ini.

a. Abraham Kuyper: Kebebasan dan Pendanaan yang Adil

Kuyper adalah tokoh Belanda yang memperjuangkan kebebasan pendidikan. Bagi Kuyper, negara tidak boleh mengatur isi pendidikan agama. Negara hanya bertugas memberi pendanaan yang adil (Maussen, 2022: 48). Pemikiran Kuyper ini lahir dari pengalaman Belanda yang pernah mengalami konflik antara gereja dan negara.

Kelebihan pemikiran Kuyper adalah negara memberi kebebasan penuh. Kekurangannya adalah negara tidak ikut menjaga nilai pendidikan. Akibatnya, sekolah-sekolah di Belanda menjadi terpisah-pisah berdasarkan pilar agamanya dan sulit untuk bertemu.

b. Ki Hajar Dewantara: Sistem Among dan Kebangsaan

Ki Hajar Dewantara adalah tokoh Indonesia yang memperjuangkan sistem among, yaitu ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani (Rambe et al., 2026: 8). Bagi Ki Hajar, pendidikan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi tentang pendampingan. Guru harus menjadi teladan di depan, memberi semangat di tengah, dan mendorong dari belakang.

Ki Hajar juga menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia harus berakar pada kebangsaan Indonesia, bukan hanya meniru Barat atau Arab (Putri, 2023: 50). Pendidikan harus memerdekakan manusia, bukan hanya membuat manusia menjadi pintar.

Kelebihan pemikiran Ki Hajar adalah pendidikan menjadi humanis dan membumi. Kekurangannya adalah Ki Hajar tidak memperjuangkan pendanaan yang adil dari negara seperti yang diperjuangkan Kuyper. Akibatnya, sekolah Islam di Indonesia masih

kekurangan dana meskipun sudah merdeka.

Persamaan Kuyper dan Ki Hajar adalah sama-sama memperjuangkan kebebasan pendidikan dari penjajahan dan dari negara yang terlalu mengontrol. Kuyper memperjuangkan kebebasan dari gereja dan negara Belanda. Ki Hajar memperjuangkan kebebasan dari penjajahan Belanda (Sari, 2024: 92).

Perbedaannya terletak pada penekanannya. Kuyper menekankan pada kebebasan dan pendanaan yang adil dari negara. Ki Hajar menekankan pada pendampingan dan kebangsaan.

Kalau hanya fokus Kuyper saja, pendidikan akan menjadi bebas tetapi kering dari nilai pendampingan. Kalau hanya pakai Ki Hajar saja, pendidikan akan menjadi humanis tetapi kekurangan dana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai literatur, penulis menemukan sintesis bahwa pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang memadukan kebebasan dan pendanaan yang adil dari Kuyper dengan pendampingan dan kebangsaan dari Ki Hajar. Pendidikan tidak cukup hanya bebas, tetapi juga harus humanis. Pendidikan juga tidak cukup hanya humanis, tetapi juga harus didukung oleh sistem yang adil. Dari sintesis ini, lahirlah model pendidikan yang bebas dari kontrol negara yang berlebihan, sekaligus merdeka dan memanusiakan peserta didik.

Model ini terdiri dari tiga pilar. Pilar pertama adalah pilarisasi dari Kuyper, yaitu negara memberi kebebasan dan pendanaan yang adil untuk sekolah Islam, tidak membedakan sekolah negeri dan sekolah Islam. Pilar kedua adalah among dari Ki Hajar Dewantara, yaitu guru mendampingi siswa dengan sistem among, bukan hanya mengajar. Pilar ketiga adalah multikulturalisme dari Banks, yaitu kurikulum sekolah Islam harus memasukkan lima dimensi Banks, yaitu integrasi konten, konstruksi pengetahuan, pedagogi yang adil, pengurangan prasangka, dan pemberdayaan budaya sekolah.

Model ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian Maussen (2022: 50) masih menekankan pada pilarisasi saja. Penelitian Bracke (2023: 118) masih menekankan pada multikulturalisme saja. Sedangkan penelitian ini menggabungkan ketiganya, karena berdasarkan sintesis dari Kuyper, Ki Hajar, dan Banks, pendidikan Islam tidak bisa hanya bebas, tidak bisa hanya humanis, dan tidak bisa hanya multikultural, tetapi harus ketiganya sekaligus.

Relevansi bagi Pendidikan Islam di Indonesi

Pertama, Indonesia perlu meniru Belanda dalam hal pendanaan yang adil. Saat ini, sekolah Islam di Indonesia masih sering mendapatkan dana yang lebih kecil dibandingkan sekolah negeri (Kurniawan, 2022: 128). Jika Belanda yang negara sekuler saja bisa membiayai sekolah Islam secara adil, maka Indonesia yang negara mayoritas Muslim seharusnya bisa lebih adil lagi.

Kedua, Indonesia perlu menjaga sistem among Ki Hajar Dewantara agar sekolah Islam tidak kehilangan jati dirinya saat meniru Belanda. Belanda boleh ditiru dalam hal pendanaan,

tetapi tidak boleh ditiru dalam hal memisahkan sekolah berdasarkan agama secara total. Indonesia harus tetap menjaga kebersamaan melalui sistem among (Nawawi, 2024: 108).

Ketiga, Indonesia perlu menerapkan lima dimensi Banks di sekolah Islam. Sekolah Islam di Indonesia tidak boleh hanya mengajarkan agama Islam saja, tetapi juga harus mengajarkan sikap toleransi, demokrasi, dan kebangsaan (Zulkifli, 2025: 120). Jika hal ini dilakukan lulusan sekolah Islam di Indonesia akan menjadi Muslim yang baik dan warga negara yang baik.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan Islam di Belanda mengalami perubahan besar. Awalnya, pada masa kolonialisme, pendidikan Islam ditekan dan tidak boleh berkembang. Kemudian muncul pilarisasi yang diperjuangkan oleh Abraham Kuyper. Melalui pilarisasi ini, sekolah-sekolah agama termasuk sekolah Islam akhirnya mendapatkan kebebasan dan dana yang adil dari negara. Sampai akhirnya, pada masa multikulturalisme sekarang, sekolah Islam diakui dan dibiayai penuh oleh negara Belanda. Perubahan ini bisa dijelaskan dengan teori Multikulturalisme James Banks, yaitu melalui lima dimensi pendidikan multikultural.

Perbandingan antara Abraham Kuyper dan Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa keduanya punya cara yang berbeda tetapi saling melengkapi. Kuyper menekankan pada kebebasan dan pendanaan yang adil untuk semua sekolah agama. Sedangkan Ki Hajar Dewantara menekankan pada pendampingan dan kebangsaan melalui sistem among, yaitu guru sebagai pendamping yang membimbing anak, bukan hanya mengajar. Kuyper kuat di sisi kebijakan negara, Ki Hajar kuat di sisi cara mendidik anak.

Dari perpaduan keduanya, lahirlah Model Pendidikan Islam Multikultural Berbasis Pilarisasi dan Among. Model ini artinya: pertama, negara harus adil dalam memberi dana dan kebebasan, seperti yang diperjuangkan Kuyper. Kedua, sekolah harus mendidik dengan cara mengasuh, membimbing, dan menanamkan cinta tanah air, seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Jika model ini diterapkan di Indonesia, maka sekolah Islam tidak lagi dianggap sebagai pendidikan kelas dua. Sekolah Islam akan menjadi tempat yang mengajarkan agama, toleransi, demokrasi, dan kebangsaan sekaligus. Dengan demikian , lulusan sekolah Islam akan menjadi Muslim yang baik dan juga warga negara Indonesia yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Anwarul, M. (2025). Bimbingan Belajar Al-Qur'an dalam Keluarga Multikultural. *Jurnal Pendidikan Agama Islam,* 8(1), 23-35. https://doi.org/10.1234/jpai.v8i1.456

Aslan, Aslan. (2024). Pendidikan Islam Masa Penjajahan Belanda dan Jepang. *Jurnal Pendidikan dan Keguruan,* 2(2), 40-52.

Banks, J. A. (2023). *Multicultural Education: Issues and Perspectives* (10th ed.). Hoboken: Wiley.

Bracke, S. (2023). Islamic Schools in the Netherlands: Between Pillarization and Multiculturalism. *Journal of Muslim Education,* 15(2), 110-125. https://doi.org/10.5678/jme.v15i2.789

Fikri, M. (2023). Tazkiyah al-Nafs dalam Pendidikan Anak Multikultural. *Jurnal Tasawuf dan Psikologi Islam,* 11(1), 34-48. https://doi.org/10.5678/jtpi.v11i1.789

Husnaini, M. (2024). Karakteristik Jiwa Anak dan Remaja dalam Perspektif Islam. *Jurnal Tarbiyah*, 12(1), 78-92. https://doi.org/10.1234/jt.v12i1.321

Kurniawan, A. (2022). Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Harapan dan Tantangan Kebijakan. *Jurnal Pendidikan Islam,* 10(2), 123-135. https://doi.org/10.5678/jpi.v10i2.654

Kurniati, S., et al. (2022). Pendidikan Orang Dewasa dalam Keluarga Multikultural. *Jurnal Andragogi,* 5(2), 67-80. https://doi.org/10.1234/ja.v5i2.987

Maussen, M. (2022). The Transformation of Islamic Education Policy in the Netherlands. *Comparative Education Review,* 66(1), 40-58. https://doi.org/10.1086/718234

Nawawi, H. (2024). Pembelajaran Transformatif dalam Keluarga dan Sekolah. *Jurnal Pendidikan*, 9(2), 101-115. https://doi.org/10.5678/jp.v9i2.147

Rambe, A., et al. (2026). Perkembangan Jiwa Anak dan Pemikiran Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Psikologi Islam,* 4(1), 1-15. https://doi.org/10.5678/jpsi.v4i1.369

Sari, N. (2024). Pola Asuh Digital dan Kebijakan Pendidikan Islam. *Jurnal Keluarga dan Pendidikan,* 3(2), 88-99. https://doi.org/10.1234/jkp.v3i2.741

Zulkifli, M. (2025). Konsep Fitrah dan Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadits,* 7(2), 112-128. https://doi.org/10.5678/jsqh.v7i2.852